

# RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, rencana kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024 telah selesai disusun. Rencana kerja tahun 2024 ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan OPD selama tahun 2024. Renja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja tahun 2024 ini. Mengingat masih banyak keterbatasan dalam penyusunan Renja ini, harapan kami adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Tabanan, 10 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Tabanan



**I Made Subagia, S.Pi, M.M**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660308 198903 1012

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Renja Dinas Pertanian merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada tahun 2024 yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Bupati Tabanan. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Pertanian masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Renja Dinas Pertanian. Penyusunan renja Dinas Pertanian merupakan tanggung jawab masing-masing kepala Dinas Pertanian yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, untuk itu Dinas Pertanian membentuk tim penyusun Renja Dinas Pertanian yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja OPD sampai dengan penyusunan RKA- OPD. Diharapkan dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan OPD secara berkelanjutan.

Renja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem

perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pertanian nantinya diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pertanian dalam arti luas.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2024 tidak boleh lepas dari beberapahal sebagaimana berikut:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Artinya apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas dapat lebih optimal.
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan

kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pertanian dan menjadi prioritas penanganan di tahun 2024.

3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkandengan baik.
4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kedudukan Rencana Kerja Dinas Pertanian adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi:

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan politik.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten

Tabanan Tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapalandasan sebagai berikut:

(1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,

(2). Landasan

Konstitusional yaitu

UUD 1945,(3).

Landasan Operasional

:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan rencana kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- k. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
- l. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
- n. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68);
  - o. Peraturan Bupati Tabanan No. 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  - p. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);
  - q. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 29);
  - r. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna

membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024 adalah:

1. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
2. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
3. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan pertanian Daerah Kabupaten Tabanan
4. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2024 serta dana yang dibutuhkan.
5. Menyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan guna menciptakan pembangunan pertanian yang terpadu

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam prosesnya, penyusunan renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Renja OPD disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka

- menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
  3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab PD.

Pokok-pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja adalah:

- Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra OPD.
  - Analisis pelayanan OPD
  - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
  - Rivew terhadap rancangan awal RKPD
  - Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- Garis besar isi Rencana Kerja dan kegiatan Masyarakat:

## BAB I. PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

## BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4 Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

III.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

##### 2.1.1 Capaian Program dan Kegiatan

Adapun capaian kinerja program disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1 Capaian Kinerja Program**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2023	Akhir Renstra
1.1	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	86,90%	100%	100%
2.1	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Produksi Padi (-6,3%) Jagung (782,85%) Kedelai: 158,17%	10%	10%
2.2	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	Produktivitas Padi: (-3,26%) Perkebunan : 6,57%	10%	10%
2.3	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	54,40%	97%	100%

2.4	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	100%	30%	65%
-----	--	--	------	-----	-----

Sumber: Data diolah

#### Analisis hasil capaian kinerja program menurut hasil LKJIP Tahun 2021

##### 1. Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan

Produktivitas tahun 2020 sebesar 64,41 dan tahun 2021 sebesar 62,31. Dari rumus perhitungan diperoleh hasil sebesar -3,26%. Hal ini berarti tahun 2021 produktivitas padi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 3,26%. Akan tetapi kalau dilihat dari hasil produksi tanaman pangan justru mengalami peningkatan. Produktivitas padi dipengaruhi oleh luas tanam padi. Dimana sepanjang tahun 2021 terdapat proyek tanam komoditas diluar tanaman padi seperti tanam jagung seluas 2.264 Ha dan proyek tanam kedelai seluas 343 ha. Produktivitas juga dipengaruhi oleh teknik budi daya, jarak tanam dan proses perhitungan sample ubinan, anakan per rumpun, jumlah serangan, jenis varietas, penggunaan pupuk kurang tepat. Untuk komoditas jagung banyak ditanam di akhir tahun 2021, sehingga luas panen menurun dan mempengaruhi provitas dan produksi. Untuk tanaman kedelai, produktivitas mengalami penurunan karena adanya panen muda yang tidak dimasukkan ke dalam sample ubinan sehingga produktivitas menjadi menurun. Untuk produksi padi di Kabupaten Tabanan tahun 2021 turun dari produksi tahun

2020. Hal ini karena di beberapa daerah mengalami serangan organisme pengganggu tanaman dan adanya penanaman komoditas selain padi di lahan pertanian. Akan tetapi meskipun produksi dan produktivitasnya turun, namun masih mampu memenuhi kebutuhan beras di kabupaten Tabanan, dan masih terdapat surplus.

Semua produktivitas komoditas perkebunan mengalami peningkatan dari tahun 2020. Hanya kopi arabika yang produktivitasnya mengalami penurunan sebesar 5,04 persen. Hal ini disebabkan karena faktor cuaca yang kurang mendukung, kualitas bibit kopi yang rendah serta kurangnya penggunaan pupuk. Kelapa Genjah, Kelapa Dalam, Kakao, Kopi Robusta, Kemiri dan Pala, mengalami peningkatan produktivitas, namun belum mampu mencapai target yang ditetapkan, hal ini karena iklim yang tidak mendukung, cuaca ekstrim dan umur tanaman komoditas unggulan sudah lebih dari 15 tahun. Pengendalian OPT dilakukan secara swadaya. Belum adanya petugas pengamat OPT di kabupaten. Pengendalian OPT masih ditangani oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan mengusulkan kegiatan untuk peremajaan komoditi perkebunan utamanya kopi secara berkelanjutan. Komoditas perkebunan khususnya kelapa hibrida, cengkeh dan aren memiliki produktivitas yang tinggi bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Produktivitas yang meningkat ini juga diikuti oleh jumlah produksi yang meningkat pula dibandingkan dengan tahun 2020

## 2. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian

Salah satu sarana produksi yang mempengaruhi produksi

komoditas strategis pertanian adalah pupuk dan pestisida. Pupuk membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen yang akhirnya akan mendorong peningkatan produksi. Penggunaan pestisida diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. terdapat peningkatan alat mesin pertanian khususnya tanaman pangan. Bahkan peningkatannya jauh melebihi target yang ditetapkan. Alat mesin tersebut antara lain pembersih gulma, pompa air, sabit bergerigi, power thresher, pemipil jagung, dan pengering tipe vertikal.

### 3. Meningkatkan Produktivitas Peternakan

Bahwa persentase cakupan vaksinasi yang telah dilaksanakan Untuk di kabupaten Tabanan, dari target vaksinasi rabies sebanyak 71.062 ekor. Tahun 2021 capaian vaksinasi sebanyak 39.010 ekor. Jumlah ini belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Karena dalam hal pelayanan kesehatan hewan, petugas terkendala penerapan *social distancing* dimana petugas vaksinasi tidak bisa mengumpulkan warga yang hendak memvaksin hewan peliharaannya di satu tempat, begitu pula petugas vaksin tidak bisa melaksanakan vaksinasi dari satu rumah ke rumah (*door to door*) karena pendanaan untuk obat-obatan tidak murni menggunakan APBD II, akan tetapi dibantu dari APBN. Secara umum faktor yang dirasa menghambat antara lain:

- Masih adanya pemilik anjing yang tidak mau memberikan

anjingnya untuk diambil sampelnya walaupun anjing yang menggigit beresiko tinggi, sehingga perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dari penyakit rabies.

- Semua depo obat hewan belum memiliki rekomendasi ijin dari dinas teknis dan obat yang dijual masih ada yang kadaluarsa sehingga perlu ditertibkan lagi.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan sehingga keinginan untuk melakukan upaya pencegahan dan sanitasi kandang masih rendah.
- Dari hasil pemantauan dan pengawasan di tempat pemotongan diluar RPH ditemukan pembuangan limbah ke sungai dan tidak ada tempat penampungan limbah.

#### 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Perwujudan sasaran ini adalah Pengembangan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok tani dalam upaya meningkatkan daya saing petani dalam pengembangan sistem agribisnis di Kabupaten Tabanan. Kapasitas petani dapat meningkat sejalan dengan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani. Tahun 2021 penyuluh membina seluruh subak sawah, subak abian, kelompok tani, kelompok tani ternak, kelompok wanita tani, gapoktan dan forum poktan, dengan jumlah 236 subak sawah, 186 subak abian, 1.682 kelompok tani, 596 kelompok tani ternak, 72 Kelompok Wanita Tani, 254 gapoktan dan 20 forum poktan, sehingga persentase ketercapaian mencapai 100 persen. Kapasitas petani dan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani akan mendorong kapasitas kelembagaan menjadi lebih efektif.

Perwujudan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa Tahun 2021 secara fisik tercapai 100% dan keuangan tercapai 95,75%. Hal ini dapat tercapai karena Terlaksananya kegiatan penyuluh yang tepat guna, tersusunnya Programa Tk. Desa, Tk. Kecamatan dan Tk. Kabupaten, Terlaksananya demplot pupuk hayati cair, untuk meningkatkan hasil petani yang berdampak pada penghasilan petani, untuk meningkatkan kualitas data kelembagaan penyuluh melalui paket data, dan mampu mendukung kegiatan operasional penyuluh yang ada di Kabupaten Tabanan.

Kelembagaan kelompok petani merupakan sarana sekaligus sasaran penyuluhan pertanian sehingga keberadaannya sangat diperlukan. Berkaitan dengan situasi ini, penguatan kapasitas kelembagaan kelompok petani memerlukan komitmen bagi kelembagaan penyuluhan, terutama kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, untuk melaksanakan tugas yang semestinya. Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan salah satu wadah organisasi yang terdapat dalam Dinas Pertanian. Fungsi utama dari kelembagaan penyuluhan pertanian adalah sebagai wadah dan organisasi pengembangan sumberdaya manusia pertanian serta menyelenggarakan penyuluhan.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPK), kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat desa adalah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pertanian pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa tercapai 100 % dan realisasi keuangan tercapai 97,84 % karena Terseleksinya kelembagaan petani, Gapoktan, KEP dan mendorong penerapan teknologi petani secara berkelanjutan dan meningkatkan teknologi kelembagaan petani sehingga tersusunnya program Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani, melalui pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan agar petani mampu menjadi wirausaha yang berprestasi, Terlaksananya penilaian kelembagaan petani secara berjenjang di Tingkat desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Terlaksananya seleksi Kelembagaan Ekonomi Petani, Poktan dan Gapoktan dan tercapainya target 1 juara tingkat Kabupaten untuk mewakili ke tingkat Propinsi Untuk Tahun 2022.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan diperlukan dukungan dana yang memadai. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan sebagai suatu organisasi yang tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di Bidang Pertanian (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008). Didasarkan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai :

- 1) perumus kebijakan di bidang pertanian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1

Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, dengan 1 Sub. Bagian dan 5 bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, yang membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang prasarana dan sarana, yang membawahi :

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang membawahi :
5. Bidang Perkebunan, yang membawahi :
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membawahi :
7. Bidang Penyuluhan
8. UPTD Dinas
9. Jabatan Fungsional

Selanjutnya Uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas:
  - a. Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
  - c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
  - d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
  - f. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perizinan usaha pertanian;
  - g. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyuluhan pertanian;
  - h. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian

kinerja dinas pertanian;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat; koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- d. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- f. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- i. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas pertanian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
  - a. menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha  
(persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
  - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
  - d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
  - e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
  - i. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
  - j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
  - k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
  - m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
  - n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan; dan
    - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang sarana dan prasarana;
  - b. penyusunan program kerja lingkup bidang sarana dan prasarana;
  - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian;
  - d. pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian;
  - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang tanaman pangan dan holtikultura;
  - b. penyusunan program kerja lingkup bidang tanaman pangan dan holtikultura;
  - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
  - d. pelaksanaan kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain;

- e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam daerah kabupaten;
  - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perkebunan;
  - b. penyusunan program kerja lingkup bidang perkebunan;
  - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten;
  - d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten;
  - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - b. penyusunan program kerja lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- c. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
  - d. pelaksanaan kegiatan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
  - e. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten;
  - f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten;
  - g. pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan penggembalaan umum;
  - h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
  - i. pelaksanaan kegiatan fasilitasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
  - j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang penyuluhan;
  - b. penyusunan program kerja lingkup bidang penyuluhan;
  - c. pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
  - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Ada beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi pembangunan Pertanian yang merupakan bagian dari proses Rencana Strategis (Renstra) yakni Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Potensi Sumberdaya Alam, SDM, Iptek dan Peraturan Perundangan, tantangan dan masalah yang dihadapi sampai saat ini, Propenas, Propeda, Renstra Kabupaten dan Lingkungan Strategis. Semua aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk menerapkan strategi juga untuk menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta Kebijakan Operasional Pembangunan Pertanian.

### **2.2.1 Kondisi Pelayanan**

Kinerja Pelayanan OPD Pertanian Kabupaten Tabanan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Pertanian. Capaian kondisi pelayanan di OPD Pertanian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura  
Kabupaten Tabanan merupakan sentra pertanian di Provinsi Bali. Untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing produk pertanian, maka secara bertahap, petani di Tabanan telah menerapkan pengolahan pertanian dengan sistem organik. Dengan memperhatikan kelestarian, kesehatan tanah, tanaman, hewan, dan manusia sebagai suatu kesatuan

karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan.

Dalam upaya membangun dan mengembangkan pertanian organik di di Bali khususnya di Tabanan, masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah masih adanya perbedaan persepsi terhadap penerapan sistem pertanian organik di lapangan oleh berbagai “*stake holder*”, maraknya klaim organik oleh pelaku usaha yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, kurangnya apresiasi masyarakat terhadap produk organik, perbedaan proses sertifikasi serta potensi dan peluang pasar yang tersedia.

## 2. Pelayanan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Untuk mewujudkan Agrobisnis pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura dan pertanian organik serta meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani melalui terpenuhinya jumlah sarana jalan usaha tani dan jaringan irigasi usaha tani dalam kondisi baik, terdatanya lahan pertanian, dan terpenuhinya sarana prasarana pupuk dan pestisida. Sasarannya adalah petani tanaman pangan / subak dan perkebunan.

## 3. Pelayanan Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan melayani peningkatan sumber daya perkebunan melalui meningkatkan produksi produktivitas dan mutu komoditas perkebunan yang meningkatkan ketersediaan benih

unggul bermutu untuk perluasan areal perkebunan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dan ekspor hasil perkebunan.

#### 4. Pelayanan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Tabanan merupakan sentra peternakan unggas, sapi dan babi bagi Provinsi Bali. Adanya penyakit hewan menular seperti penyakit Jembrana, Avian influenza (AI)/Flu burung, SE, New Castle Deases, Rabies dan lain-lain merupakan ancaman bagi peternak karena bisa menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya wabah penyakit hewan menular, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar pemerintah maupun dengan peternak. Disamping itu, langkah-langkah dan tindakan yang berkesinambungan telah dilakukan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pengobatan, vaksinasi, survailans, monitoring epidemiologi dan pengawasan obat hewan. Disamping itu, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar pemerintah maupun dengan peternak.

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan hewan sehingga produktivitas dan reproduktivitasnya dapat optimal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para petani. Selama lima tahun terakhir ini Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan Kegiatan

Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tabanan tidak saja melalui sumber dana APBD II, tapi juga melalui sumber dana APBD I, APBN dan FAO (Food and Agriculture Organization). Pelayanan Kesehatan Hewan berupa pengobatan dan vaksinasi yang telah dilaksanakan.

a. Pelayanan Inseminasi Buatan

Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak dilaksanakan Inseminasi Buatan (IB). Dengan keberhasilan dari IB diharapkan menghasilkan bibit-bibit yang bermutu yang nantinya tentu dapat menguntungkan petani ternak. Jumlah petugas IB di Kabupaten Tabanan sebanyak 67 orang sedangkan yang aktif sekarang sebanyak 52 orang sehingga diperlukan penyegaran dan pelatihan petugas IB kembali. Disamping itu penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti pengadaan container, N2 Cair, Inseminasi Kit, kandang jepit dan strow sapi Bali sangat diperlukan. Untuk mendukung program tersebut disamping melalui dana APBD II, juga didukung dari dana APBN dan APBD I.

b. Pelayanan Rumah Potong Hewan Gubug Tabanan

Kegiatan Operasional Rumah Potong dilaksanakan untuk mengkonsentrasikan pemotongan di Rumah Potong. Berdasarkan fungsinya Rumah Potong Hewan Pemerintah dimaksudkan sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat agar pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada konsumen (masyarakat) dalam mengkonsumsi daging yang beredar di pasaran. Dengan adanya Rumah Potong Hewan dapat memudahkan pengawasan kesehatan hewan yang akan

dipotong, menghindari pemotongan ternak yang sakit ataupun mati yang terkena penyakit-penyakit hewan yang bersifat zoonosis, memudahkan pemeriksaan daging hasil pemotongan, meminimalkan pemotongan di rumah-rumah khususnya di wilayah perkotaan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Dari kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan RPH sudah dilaksanakan, namun sampai saat ini pelayanan di Rumah Potong Hewan belum maksimal karena petugas untuk melaksanakan pemotongan (jagal) belum mampu untuk mengoperasionalkan alat tersebut.

#### 5. Pelayanan Bidang Penyuluhan

Bidang penyuluhan mengkoordinir penyuluh yang mampu memberikan pendampingan serta rekomendasi terhadap petani maupun peternak untuk kemajuan serta perkembangan sektor pertanian. Penyuluh pertanian juga telah mampu meningkatkan fungsi penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian secara cepat, efektif, dan efisien untuk dapat memfasilitasi akses petani terhadap sumber-sumber permodalan, pasar dan teknologi pertanian. Salah satu tugas penyuluh pertanian adalah menumbuhkan dan mengembangkan minat petani untuk mau tergabung dalam kelompok tani sehingga kedepannya kelembagaan ekonomi petani dapat meningkat.

Tantangan yang dihadapi penyuluh pertanian adalah menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke pertanian. Secara umum pencapaian kinerja pelayanan

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.2 Capaian Program dan Kegiatan Sesuai DPA Dinas Pertanian**

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ URAIAN</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Capaian (%)</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>4,522,247.00</b>	<b>90.44</b>
	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,704,149.00</b>	<b>90.14</b>
	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,818,098.00</b>	<b>90.90</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>28,005,211,423.00</b>	<b>23,526,942,686.00</b>	<b>84.01</b>
	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>27,983,831,423.00</b>	<b>23,506,223,464.00</b>	<b>84.00</b>
	<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>18,880,000.00</b>	<b>18,460,944.00</b>	<b>97.78</b>
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,258,278.00</b>	<b>90.33</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>132,409,300.00</b>	<b>103,285,785.00</b>	<b>78.00</b>
	<b>Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>1,103,000.00</b>	<b>1,103,000.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>2,217,100.00</b>	<b>2,147,913.00</b>	<b>96.88</b>
	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>48,748,800.00</b>	<b>46,223,700.00</b>	<b>94.82</b>
	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,211,200.00</b>	<b>3,484,843.00</b>	<b>82.75</b>
	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>1,090,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Penyediaan Bahan/Material</b>	<b>55,219,200.00</b>	<b>39,603,077.00</b>	<b>71.72</b>

<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD</b>	<b>19,820,000.00</b>	<b>10,723,252.00</b>	<b>54.10</b>
	<b>Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,513,439,500.00</b>	<b>1,153,538,705.00</b>	<b>76.22</b>
	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>8,625,000.00</b>	<b>8,100,000.00</b>	<b>93.91</b>
	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>286,499,500.00</b>	<b>138,825,171.00</b>	<b>48.46</b>
	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>1,218,315,000.00</b>	<b>1,006,613,534.00</b>	<b>82.62</b>
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>70,624,000.00</b>	<b>62,968,480.00</b>	<b>89.16</b>
	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>53,324,000.00</b>	<b>46,268,480.00</b>	<b>86.77</b>
	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>17,300,000.00</b>	<b>16,700,000.00</b>	<b>96.53</b>
	<b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>204,632,950.00</b>	<b>180,635,584.00</b>	<b>88.27</b>
	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>92,720,554.00</b>	<b>92.72</b>
	<b>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</b>	<b>104,632,950</b>	<b>87,915,030</b>	<b>84.02</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>35,836,795.00</b>	<b>89.59</b>
	<b>Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>35,836,795.00</b>	<b>89.59</b>
	<b>Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,790,000,000.00</b>	<b>1,781,021,957.00</b>	<b>99.50</b>
	<b>Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>1,790,000,000.00</b>	<b>1,781,021,957.00</b>	<b>99.50</b>

<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>989,750,000.00</b>	<b>928,923,378.00</b>	<b>93.85</b>
	<b>Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B</b>	<b>23,750,000.00</b>	<b>22,878,003.00</b>	<b>96.33</b>
	<b>Koordinasi Sinkronisasi Prsarana Pendukung Pertanian Lainnya</b>	<b>966,000,000.00</b>	<b>906,045,375.00</b>	<b>93.79</b>
	<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>3,509,483,000.00</b>	<b>3,240,586,449.00</b>	<b>92.34</b>
	<b>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</b>	<b>3,149,483,000.00</b>	<b>2,882,120,449.00</b>	<b>91.51</b>
	<b>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</b>	<b>360,000,000.00</b>	<b>358,466,000.00</b>	<b>99.57</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>229,984,165.00</b>	<b>65.71</b>
	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Dan Zoonosis</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>229,984,165.00</b>	<b>65.71</b>
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>221,000,000.00</b>	<b>213,723,441.00</b>	<b>96.71</b>
	<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>142,852,195.00</b>	<b>95.23</b>
	<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</b>	<b>71,000,000.00</b>	<b>70,871,246.00</b>	<b>99.82</b>
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>		<b>36,831,550,173.00</b>	<b>31,462,051,635.00</b>	<b>85.42</b>

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
1	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			100%	100%	100%	100%	86,90%	86,90%			
2	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian			10%	10%	10%	10%	Padi: (-6,3%) Jagung: 782% Kedelai: 158,17%	Padi: 6,14% Jagung: 15,47% Kedelai: 61,77%			
3	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian			10%	10%	10%	10%	Produktivitas Padi: (-3,26%) Perkebunan : 6,57 Kg/Ha	Padi: 7,6% Jagung: (19,1%) Kedelai: (2%)			
4	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner			96%	97%	98%	99%	54,40%	98,15%			
5	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh			45%	50%	55%	60%	100%	100%			

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

OPD, Dinas Pertanian adapun Isu-isu penting yang ada dimasyarakat antara lain :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian
2. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian
3. Sempitnya kepemilikan lahan pertanian dan cenderung berkurang karena adanya proses alih fungsi lahan ke penggunaan yang memiliki ekonomi sewa lahan yang tinggi.
4. Kesuburan lahan terutama kandungan bahan organik cenderung menurun
5. Ketersediaan air irigasi berkurang (terutama pada musim kemarau), disamping itu juga terjadi konversi pemanfaatan sumber daya air antara petani dan non petani (rumah tangga dan bisnis)
6. Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian (alsintan) tanaman pangan dan hortikultura
7. Belum optimalnya penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi
8. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura
9. Masih terbatasnya kemampuan petani untuk akses permodalan dan teknologi
10. Perubahan iklim global, berakibat terjadinya

perubahan musim, sehingga meningkatkan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pertanian tanaman pangan dan hortikultura

11. Masih rendahnya daya saing beberapa produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
12. Masalah Mutu dan keamanan pangan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan konsumen dan standar yang ditetapkan
13. Harga hasil pertanian berfluktuasi cukup tajam yakni sangat rendah terutama pada saat panen raya
14. Masih kurangnya kualitas SDM petani ternak dan semakin terbatasnya sumber daya manusia petani muda yang kurang tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian
15. Belum optimalnya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak (penyediaan bibit belum optimal) dan belum memadainya kualitas dan kuantitas pakan ternak.
16. Masih adanya beberapa penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan Zoonosis (rabies dan flu burung).

17. Fluktuasi harga komoditi ternak terlalu besar dan tidak sesuai dengan perkembangan harga pakan
18. Semakin terbatasnya sumber daya alam untuk pengembangan peternakan.

#### **2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini. Pelaksanaan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggungjawab / tugas yang melekat pada perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogram, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan musrenbang, forum -forum lintas pelaku, dan konsultasi publik. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023 merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas.

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan yang berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, perangkat daerah wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum -forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pada akhir tahun anggaran 2023, pemerintah daerah beserta perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, pemerintah daerah beserta perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil –hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Tabel T-C. 31**  
**Rivew terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Tabanan**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD</b>	100 %	31,485,650,893	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD</b>	100 %	31.485.650.893	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	29,003,977,693	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	29.003.977.693	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	293,078,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	293.078.800	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	499,908,300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	499.908.300	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	1,538,793,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	1.538.793.600	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terpeliharaan ya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	144,892,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terpeliharaan ya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	144.892.500	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</b>	<b>Persentase ketersediaan prasarana pendukung pertanian</b>	<b>10 %</b>	<b>2,325,768,759</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</b>	<b>Persentase ketersediaan prasarana pendukung pertanian</b>	<b>10 %</b>	<b>2.325.768.759</b>	

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian		1,206,295,690	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian		1.206.295.690	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	10 persen	170,103,594	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	10 persen	170.103.594	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyediaan benih/bibit	10 persen	949,369,475	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyediaan benih/bibit	10 persen	949.369.475	

<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<b>persentase peningkatan sarana dan prasarana pertanian</b>	<b>10 persen</b>	<b>4,410,096,579</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<b>persentase peningkatan sarana dan prasarana pertanian</b>	<b>10 persen</b>	<b>4.410.096.579</b>	
Pengembangan Prasarana Pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	10 persen	875,500,000	Pengembangan Prasarana Pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	10 persen	875.500.000	
Pembangunan Prasarana Pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	persentase peningkatan prasarana dan sarana pertanian	10 persen	3,534,596,579	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	persentase peningkatan prasarana dan sarana pertanian	10 persen	3.534.596.579	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<b>persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</b>	<b>95 persen</b>	<b>802,241,875</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<b>persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</b>	<b>95 persen</b>	<b>802.241.875</b>	

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	95 persen	761,725,000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	95 persen	761.725.000	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan vertiliner	95 persen	40,516,875	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan vertiliner	95 persen	40.516.875	
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</b>	<b>Persentase BPP yang mengalami peningkatan prestasi</b>	<b>50 persen</b>	<b>615,727,850</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</b>	<b>Persentase BPP yang mengalami peningkatan prestasi</b>	<b>50 persen</b>	<b>615.727.850</b>	

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	85 %	615,727,850	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	85 %	615.727.850

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di kabupaten Tabanan harus terus ditingkatkan. Melalui musrenbang tingkat kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. Diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2023 dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tabanan. Penyelarasan ini juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat Propinsi dan Pusat. Berdasarkan data hasil usulan masyarakat untuk Program dan Kegiatan di Dinas Pertanian Tahun 2023. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah di Bidang Pertanian karena sebagian besar mata pencaharian atau soko guru perekonomian daerah, serta penggunaan lahan Wilayah Tabanan masih didominasi bidang pertanian dalam arti luas. Dinamika perencanaan yang terus berkembang, maka Dinas Pertanian melakukan kajian partisipatif dan teknokratif sesuai tahapan perencanaan yang dikoordinir oleh Bapelitbang. Adapun usulan yang diajukan melalui hasil analisis program prioritas sebagai berikut :

**Tabel T-C 32****Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024 Kabupaten Tabanan**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
1	11. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Banjar Dinas Mandung Kangin, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	tersedianya Prasarana Pertanian	30,000,000	
2	11. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Br. Tegal Temu Kaja, Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	tersedianya Prasarana Pertanian	25,000,000	
3	11. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Br. Langan, Ds. Belumbang, Kec. Kerambitan	tersedianya Prasarana Pertanian	100,000,000	
4	11. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Banjar Dinas Tegalmengkeb Kelod, Desa Tegalmengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur	tersedianya Prasarana Pertanian	50,000,000	
5	9. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Banjar Penarukan Kaja, Desa Penarukan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	Terehabilitasinya Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik	150,000,000	
6	9. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Banjar Dinas Kebon Kaja, Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan	Terehabilitasinya Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik	100,000,000	

	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
7	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Br. Tegal Temu Kaja, Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak	25,000,000	
8	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Br. Tegaltemu Kaja, Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak	25,000,000	
9	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Banjar Kelakahan, Desa Buwit, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak	50,000,000	
10	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Br. Dinas Susut, Desa Baru, Kec. Marga, Kab. Tabanan.	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak	100,000,000	
11	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Br. Cau Desa Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan.	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak	25,000,000	
12	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Br. Baru Desa Baru, Kec Marga, Kab. Tabanan	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak	50,000,000	
13	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Br. Bayan Desa Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak	50,000,000	
14	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Banjar Dinas Gelagah, Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak	50,000,000	
15	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Br. Dinas Karadan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak	50,000,000	

16	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Banjar Penyucuk, Desa Peraan, Kecamatan Baturiti	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	50,000,000	
17	9. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Banjar Amplas, Desa Wogaya Gede, Kecamatan Penebel	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	100,000,000	
18	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Tengkidak, Kecamatan Penebel	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	50,000,000	
19	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Banjar Dinas Tegalmengkeb Kaja, Desa Tegalmengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	50,000,000	
20	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Br.Dinas Mekar Sari Carik Kauh, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	50,000,000	
21	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Banjar Dinas Dalang Desa, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	50,000,000	
22	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Selemadeg, Kec.Selemadeg, Kab.Tabanan	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	25,000,000	
23	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Br. Dinas Yeh Bakung, Ds. Lalanglinggah, Selemadeg Barat	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	25,000,000	
24	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Br. Dinas Bukit Tumpeng, Ds. Lalanglinggah, Selemadeg Barat	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	30,000,000	
25	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Br. Dinas Karyasari, Desa Karyasari, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	50,000,000	

26	10. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Br. Dinas Gulingan, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak	40,000,000	
27	24. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai Komoditas,	Br, Dinas Nyuh Gading, Desa Mundeh	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	50,000,000	

Tabel 2.3 Usulan Program dan kegiatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2024	
					Target	Rp
						APBD
		<b>URUSAN PERTANIAN</b>				37,855,866,776
<b>Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Peningkatan nilai SAKIP</b>	<b>Sasaran 1: Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Nilai SAKIP</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>		<b>-624,378,094</b>	<b>100%</b>	<b>31,582,941,270</b>
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	8,000,000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator: Jumlah tersusunnya dokumen renstra renja	2 Dokumen	4,500,000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikatornya: Jumlah tersusunnya dokumen LKjIP	1 Dokumen	3,500,000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	29,030,645,179
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator: Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	29,000,326,429			

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Indikator: Persentase terpenuhinya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	22,050,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Indikator: Jumlah tersusunnya laporan keuangan	2 dokumen	8,268,750
		Administrasi Umum Perangkat daerah		100%	324,707,593
		Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,450,858
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator: Tersedianya Peralatan Rumah tangga Lainnya	100%	4,900,282
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	58,747,500

		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	12,442,395
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	3,465,000
		Penyediaan Bahan/Material Indikator: Tersedianya bahan/material	100%	121,759,549
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Daerah	100%	102,900,000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator: Terpeliharanya arsip pada SKPD	100%	18,042,010
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	257,500,000

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	257,500,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	1,706,123,050
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator: Tersedianya jasa surat Menyurat	100%	9,509,063
	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Indikator: Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	100%	315,865,699
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1,380,748,289
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	255,965,448
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator: Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	117,582,948

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya	100%	138,382,500	
<b>Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian</b> <b>Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian</b>	<b>Sasaran 1: Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan</b> <b>Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b> <b>Indikator: Persentase Peningkatan Produksi Pertanian</b>			<b>10%</b>	<b>1,291,268,759</b>	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian		60%	1,151,295,690	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pertanian Indikator: Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			200,000,000
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator: Perluasan Areal Tanam Padi dan Jagung	10 Kec	951,295,690	
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya		4 jenis	120,103,594	
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SGD Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Kegiatan	0	0	
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 jenis tanaman	120,103,594	

			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak		15 ekor dan 18500 pohon/Stek	19,869,475
				Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	19,869,475
<b>Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian</b> <b>Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian</b>	<b>Sasaran 2: Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian</b> <b>Indikator: Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b> <b>Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan</b>			<b>10%</b>	<b>4,398,775,472</b>
			Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik		56%	499,178,893
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan / LCP2B Indikator: Tersusunnya Perda Lp2B, KP2B dan LCP2B	n/a	0
				Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Indikator: Tersedianya data Lahan Pertanian Yang Berkelanjutan	n/a	0

		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya meningkatnya Hasil Pertanian, tersedianya Prasarana Pertanian	1 dokumen	441,845,165
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan Indikator: Tersedianya Data Statistik Pertanian	1 Tahun	57,333,728
	Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator: Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik		117 unit	3,899,596,579
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator: tersedianya Prasarana Pertanian	67 unit	1,724,596,579
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Indikator: Tersedianya Embung Pertanian dalam Kondisi Baik	6 unit	175,000,000

--	--	--

Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator: Terbangunnya dan Terehabilitasinya Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik	58 unit	1,150,000,000
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit Indikator: Terbangun dan terehabilitasinya Dam Parit dalam kondisi baik	10 unit	350,000,000
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Pintu Air dalam Kondisi Baik	14 unit	100,000,000
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Rumah Potong Hewan dalam Kondisi Baik	1 unit	0
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Balai Penyuluh di Kecamatan	10 unit	200,000,000

				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya Indikator : Terbangun dan Terehabilitasinya Prasarana Lainnya dalam Kondisi Baik	3 unit	200,000,000
<b>Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian</b> <b>Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian</b>	<b>Sasaran 3: Meningkatkan Produktivitas Peternakan</b> <b>Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b> <b>Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</b>			<b>98%</b>	<b>238,612,525</b>
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		14000 ekor	198,095,650
				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Indikator: Terlaksananya Vaksinasi, tersedianya Obat-obatan dan Operasional Vaksinasi	10 Kecamatan	198,095,650
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		130 dokumen	40,516,875
			Indikator: Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator: Terawasnya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	130 dokumen	40,516,875

<b>Tujuan 2:</b> <b>Meningkat</b> <b>nya</b> <b>Produktivitas</b> <b>as</b> <b>Komoditas</b> <b>Pertanian</b> <b>Indikator:</b> <b>Persentase</b> <b>Peningkatan</b> <b>Produktivitas</b> <b>as</b> <b>Komoditas</b> <b>Unggulan</b> <b>Pertanian</b>	<b>Sasaran</b> <b>4:</b> <b>Pengembangan</b> <b>Sumber</b> <b>Daya</b> <b>Manusia</b> <b>Pertanian</b> <b>Indikator:</b> <b>Meningkatnya</b> <b>Kelas</b> <b>Kemampuan</b> <b>Kelompok</b> <b>Meningkatkan</b> <b>Kompetensi</b> <b>Penyuluh</b>	<b>PROGRAM</b> <b>PENYULUHAN</b> <b>PERTANIAN</b> <b>Indikator:</b> <b>Persentase</b> <b>Jumlah</b> <b>Kelompok</b> <b>Tani, subak</b> <b>dan subak</b> <b>Abian yang</b> <b>dibina oleh</b> <b>penyuluh</b>		55%	172,134,375
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	34%	172,134,375
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator: Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Program Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten	144 Buku	172,134,375
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Indikator: Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Program Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten		

## **BAB III**

### **TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan secara terpadu dan sinergis, dimana pemerintah pusat telah menetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas atau Nawa Cita yang wajib dijabarkan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada warga negara.
2. Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Keterkaitan RPJMN dan RPJMD merupakan dasar perencanaan pembangunan. Pemerintah pusat telah menetapkan tema pembangunan 2024 yaitu “Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas,” dan tema pembangunan daerah di tahun 2024 yaitu “ generasi milenial untuk pariwisata berkelanjutan”. Pemerintah pusat telah menetapkan 5 prioritas nasional yang sudah menjadi kewajiban daerah mendukung pencapaiannya. Adapun prioritas nasional tersebut antara lain :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Nawacita di Kementerian Pertanian yang dilaksanakan melalui program peningkatan produksi pangan, hasil nyatanya berupa swasembada padi, jagung, cabai, dan bawang merah dalam kurun waktu yang singkat. Dalam kurun tiga tahun sejak 2014, produksi padi, jagung, cabai, dan bawang merah terus meningkat. Di antara beberapa komoditas tersebut, yang semula impor, berbalik status menjadi ekspor. Kebijakan Penyelamat Swasembada Pangan yang telah ditempuh antara lain Perpres No. 172 Tahun 2014 tentang perubahan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, refocusing anggaran pada komoditas pangan strategis dan infrastruktur pertanian, program UPSUS, bantuan benih pada

lokasi yang tidak existing, pemberlakuan reward and punishment dalam pelaksanaan penganggaran, implementasi asuransi pertanian, dan penetapan HET dan HPP, juga termasuk pembentukan satgas pangan. Berbagai kebijakan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan swasembada, bahkan mengembangkannya pada komoditas potensial.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2021. Dimana visi Kementerian Pertanian yakni : “Terwujudnya Sistem Pertanian – Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan pangan dan Kesejahteraan Petani”. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

- a. Mewujudkan Kedaulatan Pangan
- b. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
- c. Mewujudkan kesejahteraan petani
- d. Reformasi Birokrasi

Sebagai penjabaran visi dan misi Kementrian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015 -2021 yang ingin dicapai yaitu : Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan meningkatkan kualitas kerja aparatur pemeintah bidang pertanian yang amanah dan professional.

Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015 – 2021 adalah :

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal.
2. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu ha untuk menggantikan alih fungsi lahan
3. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi serta terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta ha.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan**

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian

Kabupaten Tabanan tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

No.	Tujuan	No.	Sasaran
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.1	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	2.1	Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan

		2.2	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian
		2.3	Meningkatkan Produktivitas Peternakan
		2.4	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Sumber: RPJMD Kab. Tabanan

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. menurut permendagri 54 Tahun 2010, program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja Dinas Pertanian merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran(output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran dalam prioritas (Permendagri 54 Tahun 2010)

**Tabel T-C. 33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Tabanan**

**Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	DINAS PERTANIAN				39.639.485.956,00				39.679.485.956,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				39.639.485.956,00				39.679.485.956,00	
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			39.639.485.956,00				39.679.485.956,00	
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	31.485.650.893,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		31.535.650.893,00

3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.000.000,00
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	29.003.977.693,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		144 Orang/bulan	29.003.977.693,00
3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	293.078.800,00	Pajak Air Permukaan		Pajak Air Permukaan	293.078.800,00
3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	499.908.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			549.908.300,00

3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1.538.793.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.538.793.600,00
3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	144.892.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	144.892.500,00
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pendukung pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	2.325.768.759,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	2.325.768.759,00
3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.206.295.690,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.206.295.690,00

3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 persen	170.103.594,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	170.103.594,00
3	27	02	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan benih/bibit	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 persen	949.369.475,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		15 Dosis	949.369.475,00
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase peningkatan sarana dan prasarana pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 persen	4.410.096.579,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	4.410.096.579,00
3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 persen	875.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	875.500.000,00

3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	persentase peningkatan prasarana dan sarana pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 persen	3.534.596.579,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	3.534.596.579,00
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 persen	802.241.875,00			1 Laporan	802.241.875,00
3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 persen	761.725.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	761.725.000,00

3	27	04	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan vertiliner	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 persen	40.516.875,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	40.516.875,00
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase BPP yang mengalami peningkatan prestasi	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 persen	615.727.850,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		10 Unit	605.727.850,00
3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 %	615.727.850,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		10 Unit	605.727.850,00
<b>TOTAL</b>								<b>39.639.485.956,00</b>				<b>39.679.485.956,00</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**4.1 Rencana Target Kinerja 2024**

Ditahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target sesuai Permendagri 86 tahun 2017 dan permendagri 90 tahun 2019. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Target Kinerja di tahun 2024 seperti yang di tampilkan pada

Tabel 4.1 Rencana Target Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024

<b>PROGRAM</b>	<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<b>TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD
		100%	Administrasi Umum Perangkat daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD
		100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD

		100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD
		100%	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	50%	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian
		1 jenis	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya
		15 ekor dan 18500 pohon/Steek	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	50%	Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik
		57 unit	Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator: Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis	6000 ekor	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan
MASYARAKAT VETERINER	kesehatan masyarakat veteriner		Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

		100 dokumen	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator: Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	25%	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas

#### 4.2 Rencana Kerja Kegiatan 2024

Sinergisitas pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pendanaan pembangunan ditempuh dengan integrasi pembangunan baik yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan APBD, dibiayai oleh lembaga lainnya (swasta dan investor), maupun swadaya masyarakat.

Dinamisasi perencanaan kinerja maka Dinas Pertanian telah melakukan analisa perencanaan anggaran yang berproses dari perencanaan partisipatif dengan berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2024 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2024 disampaikan pada berikut.



					Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Peran dan Peran Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 dokumen	3.000.000,00	Pajak Air Permuakaan		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
					Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	2 dokumen	2.000.000,00	Pajak Air Permuakaan		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							29.003.977.693,00					29.003.977.693,00
3	27	01	2.01	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												

						Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggara administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	144 Orang/bulan	2 dokumen	29.001.477.693,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/bulan	29.001.477.693,00
3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
						Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keua	Persentase terselenggara administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 dokumen	2.500.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2.500.000,00





						Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Perentase terselenggara administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Paket	100 persen	12.442.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	12.442.000,00
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
						Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Perentase terselenggara administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	100 persen	3.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.450.000,00
3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												

						Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase terselenggara administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Paket	100 persen	85.218.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	85.218.000,00
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggara administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	100 persen	102.883.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	102.883.000,00
3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													

					Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terselenggara administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	2 Dokumen	100 persen	9.971.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	9.971.400,00	
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						499.908.300,00					549.908.300,00	
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Unit	100 %	299.908.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	299.908.300,00	
3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

					Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	200.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000,00
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.538.793.600,00				1.538.793.600,00
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
					Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	100 persen	9.496.500,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.496.500,00



						Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Perentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	100 persen	1.213.438.200,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.213.438.200,00	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								144.892.500,00				144.892.500,00	
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	Perentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	10 Unit	100 persen	117.982.500,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	117.982.500,00	



						Persentase keterse-diaan prasarana pendukung pertanian	Jumlah Pengan-gunaan Sarana Pertanian Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Perse-ntase Peggunaan Sarana Pertanian	- Kab. Tabana-n, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	1 Laporan	10 persen	255.000.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	Jumlah Pengawasa-n Penggunaa-n Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas , Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 L a p o r a n	255.000.000,00
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian												
						Persentase keterse-diaan prasarana pendukung pertanian	Jumlah Penda-mping-an Peggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Perse-ntase Peggunaan Sarana Pertanian	- Kab. Tabana-n, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	1 Laporan	10 persen	951.295.690,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	Jumlah Penda-mping-an Penggunaa-n Sarana Pendukung Pertanian	1 L a p o r a n	951.295.690,00
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							170.103.594,00					170.103.594,00

3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman												
					Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pengeolaan Sumber Daya	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 persen	1 Dokumen	10 persen	120.103.594,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	120.103.594,00
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman												
					Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Jumlah Pengeolaan Sumber Daya	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 persen	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	10 persen	50.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	50.000.000,00
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							949.369.475,00					949.369.475,00
3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain												

					Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Penyebaran benih/bibit	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 persen	15 Dosis	10 persen	949.369.475,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	15 Dosis	949.369.475,00	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							4.410.096.579,00					4.410.096.579,00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian							875.500.000,00					875.500.000,00
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya												
					persentase peningkatan sarana dan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 persen	1 Laporan	10 persen	875.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	875.500.000,00	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian							3.534.596.579,00					3.534.596.579,00
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian												

					Persentase keterse-diaan prasarana pendukung pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	perse ntase penin-gkatan prasarana dan sarana pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	1 Unit	10 persen	120.000.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	120.000.000,00		
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
					Persentase keterse-diaan prasarana pendukung pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	perse ntase penin-gkatan prasarana dan sarana pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	58 Unit	10 persen	1.590.000.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	58 Unit	1.590.000.000,00		
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
					Persentase keterse-diaan prasarana pendukung pertanian	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun	perse ntase penin-gkatan prasarana dan sarana pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	1 Unit	10 persen	200.000.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	200.000.000,00		



					persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 persen	1 Laporan	95 persen	761.725.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	761.725.000,00
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							40.516.875,00				40.516.875,00
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan											

						persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan veteriner	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 persen	1 Laporan	95 persen	40.516.875,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	40.516.875,00	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							615.727.850,00					605.727.850,00	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							615.727.850,00						605.727.850,00
3	27	07	2.01	00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa													
					Persentase BPP yang mengalami peningkatan prestasi	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapas	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binangun yang Berhasil Meningkatkan Kelas	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 %	10 Unit	50 persen	60.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	50.000.000,00		



					Persentase BPP yang mengalami peningkatan prestasi	Jumlah Sekolah Lapangan Kelompok Tani yang Terbetuk dan Beroperasi	Perentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 %	1 Unit	50 persen	140.727.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sekolah Lapangan Kelompok Tani yang Terbetuk dan Beroperasi	1 Unit	140.727.850,00
<b>TOTAL</b>												<b>39.639.485.956,00</b>		<b>39.679.485.956,00</b>		

## PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pertanian dalam arti luas. Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan Dinas Pertanian juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Pertanian untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Ditahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu factor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2024 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan.

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2024. Dana tersebut akan digunakan membiayai beberapa program dan kegiatan.



**BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 180/1188/03/HK/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**BUPATI TABANAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dipandang perlu membentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Rencana Kerja;
  - b. mengumpulkan bahan-bahan penyusunan Rencana Kerja;
  - c. memantapkan draft penyusunan Rencana Kerja;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi internal program dan kegiatan pada Dinas Pertanian secara berkala sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi; dan
  - e. melaporkan hasil Rencana Kerja kepada Bupati.
- KETIGA** : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 6 Desember 2022

an. BUPATI TABANAN  
KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN TABANAN,



I MADE SUBAGIA, S.Pi, M.M  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196603081989031012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

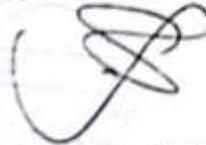
1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Badan / Dinas/ Bagian se-Kabupaten Tabanan;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 180/1188/03/HK/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2024

- Pemanggung jawab : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan.  
Pengarah : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan.  
Ketua : Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Pertanian  
Kabupaten Tabanan.  
Anggota : Para Kabid pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

an. BUPATI TABANAN  
KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN TABANAN.



I MADE SUBAGIA, S.P., M.M  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196603081989031012



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS PERTANIAN

JALAN GATOT SUBROTO II, NOMOR 1, TELEPON : (0361) 810937  
Website: <http://distan.tabanankab.go.id/> dan Email: [distan@tabanankab.go.id](mailto:distan@tabanankab.go.id)  
Sanggulan - Tabanan

Tabanan, 5 Desember 2022

Nomor : 520 / 14747 / Distan  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Prihal : Pembahasan Ranwal Renja 2024

Kepada:  
Yth. Kepala Bidang  
Lingkup Dinas Pertanian  
Kabupaten Tabanan

Dalam rangka penyusunan rancangan awal Renja tahun 2024 pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, maka diharapkan kehadiran saudara, dengan membawa dokumen usulan kegiatan tahun 2024 pada:

Hari : Selasa, 6 Desember 2022

Jam : 09.00 wita

Tempat : Ruang Rapat Distan

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian Kab. Tabanan



I Mudi Subagia, S. Pi, M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19660308 198903 1 012



පළාති කෘෂිකර්ම මධ්‍යම කොටු කාර්යාලය  
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
පළාති කෘෂිකර්ම මධ්‍යම කොටු කාර්යාලය  
DINAS PERTANIAN

රාජ්‍ය සේවා මධ්‍යම කොටු කාර්යාලය (0361) 810937  
JALAN GATOT SUBROTO II, NOMOR 1, TELEPON : (0361) 810937  
Website: <http://distan.tabanankab.go.id/> dan Email: [distan@tabn@gmail.com](mailto:distan@tabn@gmail.com)  
Sanggulan - Tabanan

## NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Pembahasan Ranwal 2024  
Hari/tanggal : Selasa, 6 Desember 2022  
Jam : 09.00 wita  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Rapat dibuka Oleh : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Peserta rapat :

- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
- Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
- Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
- Kepala Bidang peternakan dan Kesehatan Hewan
- Kepala Bidang Perkebunan
- Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
- Kepala Bidang Penyuluhan
- Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Hal yang dibahas :

- Capaian kinerja
- Rencana kerja tahun 2024

Kesimpulan

- Rencana kerja awal tahun 2024 akan disusun berdasarkan hasil rapat dengan disesuaikan dengan renstra Dinas Pertanian tahun 2021-2026. Capaian kinerja yang dipergunakan adalah capaian kinerja tahun 2021 mengingat tahun 2022 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja.

Demikian Notulen rapat ini di sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabanan, 6 Desember 2022

PPTK Kegiatan

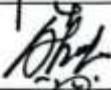
I Komang Agus Suadiasa, ST, M.Si  
NIP. 198004212006041016

DAFTAR HADIR

HARI/ TANGGAL : SELASA, 6 DESEMBER 2022

TEMPAT : RUANG RAPAT DISTAN

PRIHAL : RAPAT PENYUSUNAN RANWAL RENJA 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	I Made Subagia	Kasietan	
2	I Made Sute	kebid	
3	INYOMAN SUADIASA	kebid TPH	
4	Gelele Parta Arin	kebid PKH	
5	NI NYOMAN RIANSI	Kabid PSP	
6	I Gede Wayan Suara	KABID ANU	
7	Sani Dewi Indrawati	Kabid Penpulhan	
8	I Komang Agus Suadiasa	ka. Subang Lemondan Kelumpang	
9			
10			

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



I Komang Agus Suadiasa, ST, MSi

Penata Tk.I ( III/d )

NIP. 19800421 200604 1 016